

Siasat Politis Taiwan

Kemenangan Tsai Ing Wen, presiden perempuan pertama di Taiwan tahun 2016 lalu membawa serta pertanyaan besar, ke arah mana kiblat kebijakan ekonomi Taiwan sesudahnya?



Presiden perempuan yang masih melajang ini mengusung ideologi pro-kemerdekaan, yang didukung oleh

Partai Progresif di belakangnya. Namun demikian, mimpi ini lumayan sulit, kalau tidak mau dikatakan mustahil. Kemerdekaan Taiwan adalah tabu bagi RRC, bahkan RRC bersumpah akan melakukan segala cara untuk menyatukan kembali Taiwan yang dianggap sebagai provinsi pembangkang, apabila nekad memproklamasikan diri sebagai negara merdeka.

Sebagai jalan tengah ditempuhlah “Kesepakatan 92” antara pemerintah Taiwan dan RRC yang berisi prinsip satu Cina dengan dua pemerintahan. Tak bisa dipungkiri, rezim sebelumnya (Partai Nasionalis) yang pro-unifikasi, mendapatkan sangat banyak insentif ekonomi dari pemerintah RRC. Taiwan menggantungkan derap ekonominya pada ekspor, dan pangsa pasar daratan Cina menjadi sangat krusial. Taiwan yang sudah mengembangkan industri yang menghasilkan produk teknologi canggih sangat membutuhkan pangsa pasar yang besar macam Cina.

Pangsa pasar domestik tak mampu menampung seluruh pasokan produk berbasis teknologi canggih. Di sisi lain, RRC bisa memberikan kelonggaran pasar internasional sebagai imbal-balik atas ‘sikap manis’ Taiwan untuk mematuhi “Kesepakatan 92”. Dengan kata lain, panggung lobi perdagangan internasional pun terbuka lebar tanpa harus takut direcoki oleh Beijing. Inilah yang seringkali disebut oleh Beijing sebagai



Oleh: Agus Suyono
Kontributor Tetap Desk Asia,
Tinggal di Taiwan



win-win solution atas sejarah pelik kedua rezim politik ini.

Buah kemesraan Taipei-Beijing ini tampak dalam denyut ekonomi turisme di Taiwan. Industri pariwisata dalam kurun waktu 2008-2016 terlihat sangat kentara dampaknya bagi perekonomian Taiwan. Turis dari daratan Cina membludak di seantero

Taiwan, menggerakkan sektor ekonomi informal yang selama ini tak tersentuh. Yang paling terasa adalah okupansi hotel yang mendekati 100% dan biro travel yang menjamur dan terbukanya ribuan lapangan pekerjaan baru di sektor pariwisata. Semua orang pasti ingin mendapatkan bagian kue ekonomi dari RRC, itulah poinnya.

Statistik Turis RRC di Taiwan			
Tahun	Jumlah Turis	Perbandingan dengan Tahun sebelumnya	Persentase pertumbuhan
2008	329.204		
2009	972.123	642.919	195,3%
2010	1.630.735	658.612	67,7%
2011	1.784.185	153.450	9,4%
2012	2.586.428	802.243	45,0%
2013	2.874.702	288.274	11,1%
2014	3.987.152	1.112.450	38,7%
2015	4.184.102	196.950	4,9%
(prediksi)2016	3.480.000	-700.000	-17%
Angka riil	3.510.000	-670.000	-16%
2017	2.222.000	-1.290.000	-37%
Angka riil	???	???	

Sumber: Badan Transportasi dan Turisme Taiwan, berdasarkan data 9 Januari 2017

Tren peningkatan angka kedatangan turis dari daratan Cina ke Taiwan ini menjadi indikasi jelas dalam kurun waktu 2008-2016 betapa rezim Presiden Ma-Ying Jeou menikmati beragam efek domino dari membanjirnya turis daratan Cina ke Taiwan.

Keadaan mulai berubah pada pertengahan 2016, ketika suhu politik menghangat dan indikasi kemenangan Partai Progresif yang pro-kemerdekaan mulai terasa. Paruh kedua tahun 2016 kedatangan turis Cina mulai merosot. Para pelaku ekonomi mulai resah. Suka atau tidak, mereka harus menanggung akibat dari pembatasan visa turisme pemerintah RRC ke Taiwan. Banyak sektor industri pariwisata terancam gulung tikar. Persoalan politik dua pemerintahan yang dipisahkan oleh selat Taiwan ini berimbas pada situasi ekonomi kedua belah pihak. Negara dengan ekonomi raksasa macam Cina pasti hanya terasa sedikit dampaknya, namun untuk Taiwan, hal ini cukup menguras stamina untuk mengatur



strategi baru di tengah tekanan pemerintah Beijing.

Tantangan kebijakan politik luar negeri dan ekspansi ekonomi untuk keluar dari bayang-bayang Beijing menjadi tahap pertama untuk menormalkan situasi perekonomian negeri Formosa ini. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap kondisi ekonomi terkini. Utamanya adalah untuk merekayasa pertumbuhan ekonomi atau mencegah konsekuensi ekonomi yang lebih buruk. Penggunaan intervensi dan strategi kebijakan publik ini secara aktif menunjukkan niat politik

pemerintah untuk mengubah keadaan ekonomi tertentu demi memajukan kesejahteraan masyarakat Taiwan secara umum.

Antara Domestik dan Mancanegara

Kebijakan politik ekonomi Taiwan boleh dibilang sangat unik. Hal ini terkait dengan status Taiwan yang *de facto* memiliki pemerintahan yang sah, namun kurang mendapatkan legitimasi dari dunia Internasional sebagai akibat tekanan dari Beijing. Negara pulau ini hanya diakui oleh 21 negara gurem di Samudera Pasifik macam Kep. Solomon, beberapa negara kecil di Afrika dan Amerika Latin. Salah satu negara Afrika, Malawi beberapa tahun lalu, karena iming-iming kue investasi dari Beijing, akhirnya memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan memulai relasi setingkat kedutaan di Beijing. Dalam tata hubungan masyarakat Internasional, hal ini tampak normal. Tak ada yang abadi dalam politik, kecuali kepentingan. Taiwan juga menggunakan misi ekonomi dan budaya untuk memperluas jaringan pergaulan Internasional. Hal ini tentu berkenaan dengan kebijakan ekonomi, baik



domestik maupun Internasional.

Implementasi kebijakan fiskal (mis. perpajakan dan pengeluaran) dan kebijakan moneter (bank sentral tentang pengaturan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga) sering menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Di belakang semua itu biasanya ada Bank Dunia atau Dana Moneter Internasional atau Bank Sentral Amerika sebagai acuan kebijakan. Pola seperti ini lazim terjadi di negara yang berdaulat. Namun tidak demikian dengan Taiwan.

Dari seluruh faktor penentu di atas, salah satu faktor penting yang tak bisa diabaikan adalah perilaku Beijing. Setiap geliat ekonomi daratan Cina hampir pasti berimbas pada Taiwan. Jangka waktu yang begitu lama tentang ketergantungan ekonomi pada Cina membuat

Taiwan lumayan kedodoran untuk menegakkan kedaulatan ekonominya. Nilai perdagangan Taiwan-Cina yang menduduki sebagian terbesar dari total ekspor Taiwan ini akan sangat mudah terpengaruh dengan kebijakan Beijing yang tak ramah lagi pada Taipei. Prioritas inilah yang sedang diantisipasi pemerintahan presiden Tsai, dengan apa yang disebutnya sebagai diversifikasi kebijakan ekonomi.

Presiden Tsai Ing-Wen mengatakan pada 14 Februari 2017 bahwa pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dengan berbasis pada industri inovatif. Taiwan, meski tak memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun memiliki sumber daya manusia berkualitas tinggi, ethos kerja ilmuwan yang kuat, baik itu ilmuwan domestik

maupun mancanegara dalam iklim kerja sama yang kuat. Di negara pulau ini, segala ras manusia di kolong langit ini ada. Di samping itu, mata rantai industri yang terkoordinasi dengan sistematis, dari industri hulu-hilir, perusahaan kecil-menengah-gurita. Namun di atas semua itu adalah semangat kewirausahaan yang sudah mendarah-daging dan membudaya

Untuk mengejawantahkan semangat industri canggih dengan semangat inovasi, perluasan lapangan kerja dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Taiwan memprioritaskan lima industri inovatif utama. Kelima sektor industri itu adalah energi ramah lingkungan, bioteknologi, mesin canggih, pertahanan nasional, dan mempromosikan serta memperkuat keberadaan lembah Silikon Asia.



Taiwan juga akan menciptakan iklim kinerja yang baik untuk kelima industri ini, dengan tujuan transformasi ekonomi Taiwan. Dengan ini, pemerintah berusaha untuk meningkatkan daya saing industri dan memperbaiki pendapatan perusahaan, sekaligus meningkatkan upah dan merangsang lapangan kerja.

Menurut Presiden Tsai, pelonggaran peraturan sangat penting dalam membangun lingkungan bisnis yang mendorong inovasi dan investasi. Dalam hal ini, amandemen Undang-Undang Ketenagalistrikan telah disahkan dan pemerintah membuat kemajuan



dalam perubahan Undang-Undang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dasar, serta dua undang-undang yang mengatur perekrutan tenaga asing dan inovasi teknologi keuangan.

Kebijakan fiskal baru juga akan berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi, kata Tsai, menambahkan bahwa kabinet akan mengungkap sebuah proyek prestisius pembangunan infrastruktur roket. Tak kalah penting adalah

peningkatan infrastruktur ekonomi digital, transportasi kereta ramah lingkungan dan energi terbarukan. Untuk proyek yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, maka perusahaan pelat merah juga diperintahkan untuk terjun langsung.

Misalnya Taiwan Power Co. (PLN) yang berkomitmen investasi sebesar US\$ 9,73 miliar untuk pengembangan listrik tenaga angin dan tenaga surya. Sementara itu CPC Corp. (semacam

Pertamina) akan mencurahkan US\$ 6,6 miliar untuk menstabilkan pasokan migas dan mengurangi polusi udara. Presiden Tsai juga akan menyediakan regulasi bagi sektor swasta untuk berperan aktif investasi dan bisnis untuk mengembangkan produk dan layanan yang berfokus pada energi terbarukan, tata perumahan perkotaan dan aplikasi kota cerdas untuk membantu kenyamanan hidup masyarakat urban.

Ekonomi Poros Selatan

Komitmen perdamaian Taiwan-Cina dilakukan dengan pendekatan yang berbeda. Presiden Tsai mengakui kenyataan adanya Kesepakatan 92, namun sikap politiknya tak menjadikan Kesepakatan 92 sebagai pijakan untuk melestarikan hubungan dengan daratan Cina. Alih-alih melakukan pendekatan ke daratan Cina, Taiwan di bawah rezim Tsai malah berusaha membangun poros ekonomi baru, yakni ASEAN, Australia dan Selandia Baru. Disadari bahwa ASEAN merupakan negara-

negara yang terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil, sangat menjanjikan untuk investasi dan menjalin hubungan perdagangan, pertanian, bisnis, budaya, pendidikan dan pariwisata. Pemerintah bahkan memberikan insentif bagi para pelaku usaha yang melakukan ekspansi ke kawasan ASEAN, Australia dan Selandia Baru.

Sektor swasta Taiwan mendapat keuntungan dari regulasi perdagangan dan kebijakan pasar terbuka yang dikembangkan dengan sangat transparan, yang memfasilitasi arus barang dan modal secara bebas. UKM yang sejak ledakan ekonomi di Taiwan telah menjadi tulang punggung ekspansi ekonomi Taiwan juga diberikan bantuan promosi pemasaran ke kawasan ASEAN. Dewan Perdagangan Luar Negeri Taiwan secara khusus menggelontorkan dana US\$ 2,6 juta untuk membuka pangsa pasar baru. CEO Dewan Perdagangan Luar Negeri, Wen Rong-Huang bahkan secara tegas menekankan, "Kita harus memperlakukan pasar Asia Tenggara sebagai pasar domestik, mereka adalah bagian dari keluarga kita. Kita menyambut tenaga kerja mereka, karena kita membutuhkan mereka untuk menggerakkan ekonomi kita."

Sikap ini seakan menegaskan alam demokratis Taiwan yang menerima kehadiran orang asing, menjunjung tinggi azas kekeluargaan, dan mempromosikan keramahan masyarakat Taiwan yang menerima kemajemukan sebagai aset negara. Dengan sikap menjunjung tinggi kualitas SDM, maka terbuka kemungkinan bagi semua ras dan warna kulit untuk tinggal dan berkontribusi bagi masa depan

Taiwan. "Kita tidak bisa hanya membuat pabrik dan mengekspor produk tanpa menjalin hubungan yang utuh dan komprehensif dengan mereka. Memahami budaya mereka adalah kunci untuk memenangkan pangsa pasar sekaligus meraih hati mereka," demikian pungkas Wen Rong-Huang.



Alam demokratis Taiwan yang menerima kehadiran orang asing, menjunjung tinggi azas kekeluargaan, dan mempromosikan keramahan masyarakat Taiwan yang menerima kemajemukan sebagai aset negara ”

Konsep ini merupakan salah satu implementasi kebijakan ekonomi utama Presiden Tsai untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan ASEAN. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan Taiwan pada China, yang mengambil 40% dari ekspor pulau Formosa itu. Poros Ekonomi Selatan merupakan harapan. Lebih tepatnya sebuah pilihan mendesak. Terlebih setelah rezim Tsai secara tersirat menolak prinsip Satu Cina. Namun banyak analis yang mengatakan tanpa hubungan baik dengan daratan China, kebijakan tersebut tidak mungkin menghasilkan banyak kemajuan. "Untuk membuat kebijakan kebijakan selatan yang baru, kita harus mempertimbangkan hubungan dengan daratan Cina," kata Jiang (Wakil Direktur TAITRA), "Bagaimanapun, Cina memiliki pengaruh besar di kawasan ASEAN, baik secara ekonomi maupun politik.

Geoekonomi dan geopolitik di kawasan itu takkan bisa dilepaskan

dari kebijakan luar negeri Beijing." Namun beberapa pengamat lain mengatakan Beijing tidak akan mendapat keuntungan apa pun dari campur tangan dalam upaya Taiwan untuk beralih ke selatan. Bahkan sikap dan kebijakan publik yang kontra terhadap kebijakan ekonomi Taiwan ini malah akan membuat Presiden Tsai

mendapatkan panggung Internasional untuk mendramatisir penindasan ekonomi daratan Cina terhadap Taiwan. Dan tentu saja ini akan merugikan politik luar negeri Beijing sendiri. Namun sebagaimana diulas pada bagian awal, hubungan lintas selat yang stagnan telah membawa dampak pada ekonomi pulau ini. Industri pariwisata Taiwan termasuk yang pertama merasakan dampaknya, setelah jumlah pengunjung dari China terjun bebas di tahun 2017 ini. Sementara di sisi lain, sektor teknologi canggih di Taiwan ini juga berjuang melawan dominasi China, yang telah membangun mata rantai pasokan sendiri secara terstruktur, baik itu domestik maupun mancanegara.

Diplomasi Ekonomi, Budaya dan Pendidikan

Rezim Tsai yang baru seumur jagung ini memikul beban harapan warga yang memimpikan beberapa target revitalisasi ekonomi Taiwan,

antara lain: peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengangguran rendah, pemerataan pendapatan, perumahan yang terjangkau bagi kaum menengah ke bawah, kedaulatan pangan dan kualitas hidup di alam demokrasi. Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, impian ini menjadi sangat sulit untuk diwujudkan. Apalagi

di bawah bayang-bayang dominasi daratan Cina, dalam banyak aspek sangat sulit untuk menegakkan kedaulatan ekonomi Taiwan. Namun dengan pondasi ekonomi yang kuat, plus revitalisasi industri inovatif, para pelaku bisnis bisa menangkap peluang sempit untuk pertumbuhan dan ekspansi.

Harapan lain yang dibebankan pada rezim ini adalah agar bisa memperluas mimbar interaksi Taiwan dengan dunia Internasional. Dobrakan poros Selatan ini menurut Presiden Tsai sangat sederhana. Semua ini berkaitan dengan ekonomi dan perdagangan. Gagasan poros Selatan ini bagi Taiwan tak bertujuan



menciptakan geopolitik tertentu, melainkan menekankan peran aktif Taiwan di kawasan regional ASEAN plus Australia dan Selandia Baru. Kerja sama perdagangan ini dipersempit dalam konteks perluasan pasar, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang menguntungkan kedua belah pihak. Ada beberapa intisari dari Kebijakan Poros Selatan yang mau dihidupkan oleh pemerintah Taiwan:

1 Kesadaran untuk kerjasama ekonomi yang saling melengkapi dan memperkuat kerjasama dengan negara-negara tujuan dalam hal pengembangan SDM, pengembangan pasar domestik, industri manufaktur dan usaha kecil dan menengah.

2 Taiwan memiliki keahlian dan pengalaman yang cukup untuk berbagi di bidang yang disebut di atas. Proyek kolaborasi dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan negara-negara mitra sekaligus memberikan kesempatan bagi perusahaan lokal Taiwan untuk melakukan ekspansi mancanegara.

3 Berkenaan dengan SDM, perguruan tinggi berkualitas di Taiwan dapat membantu melatih para pekerja terampil, insinyur dan peneliti untuk melakukan riset lebih lanjut negara-negara berkembang di kawasan ini. Sekedar contoh, sekarang ini ada sekitar 1.200 mahasiswa India yang sedang menimba ilmu di Negeri Bunga Mei Hua ini. Rencana ke depan, sebagai akibat dari Kebijakan Poros Selatan ini akan diundang sekitar 5.000 penerima beasiswa baru dari kawasan ASEAN plus Australia dan Selandia Baru. Sponsor utama adalah perusahaan-perusahaan yang telah ditentukan dalam regulasi khusus.

4 Berkenaan dengan pengembangan pasar domestik, Taiwan memiliki pengetahuan teknis untuk membantu negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara memanfaatkan berbagai peluang baru. Contoh, keterbatasan produk *seafood* di pedalaman India bisa dijawab oleh keahlian dan pengalaman Taiwan di bidang budidaya, logistik dan pengolahan makanan. Mata rantai pasokan ini dapat membantu pengembangan pasar potensial dengan penduduk yang sangat besar di India ini.

5 Sektor manufaktur canggih di Taiwan dan secara khusus industri perkapalan yang maju, dapat membantu membuka potensi pasar domestik yang besar di Indonesia dengan memperkuat armada transportasi antar pulau serta membentuk kawasan industri perikanan.

6 Taiwan sangat teruji dalam pengembangan UKM. UKM menjadi basis kuat untuk 'tinggal landas' dalam pembangunan ekonomi Taiwan. Pemerintah Taiwan siap dan bersedia untuk berbagi pengalaman dalam membudayakan dan mental UKM yang energik dan tangguh, yang menjadi solusi penting untuk mengatasi ketidaksetaraan pendapatan dan memberdayakan ekonomi lokal.

Keenam intisari disokong dengan kebijakan lima proyek industri berbasis inovasi untuk bekerja sama dengan negara-negara ASEAN plus Australia dan Selandia Baru. Kerja sama ini juga diperluas dengan membangun mata rantai pasokan industry, pertukaran mahasiswa, interaksi *people to people*. Taiwan juga sangat maju dalam bidang pertanian dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan produk pertanian di kawasan ASEAN.

Kebijakan strategis ini dibarengi dengan pelonggaran persyaratan visa kunjungan dan mendorong perluasan sertifikasi makanan halal di Taiwan. Dengan mendorong interaksi yang beragam dan komprehensif tersebut, kebijakan poros selatan ini akan berkontribusi pada pengembangan dan kesejahteraan negara-negara terkait serta membangun citarasa komunitas regional antara Taiwan dengan negara-negara kawasan ASEAN plus Australia dan Selandia Baru.

Referensi:

<http://www.mofa.gov.tw>
http://www.taitra.org.tw/index_ch.asp
<http://www.trade.gov.tw/>